



FORMULIR PERNYATAAN DIRI (CRS)

- Mohon mengisi dengan menggunakan pulpen warna hitam, huruf cetak dan tulisan tidak keluar dari kotak, jelas dan memberi tanda ✓ pada kotak jawaban yang sesuai.
- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Pemegang Polis di sebelahnya sesuai dengan kartu identitas diri yang dilampirkan.
- Jika memiliki pertanyaan terkait Domisili Wajib Pajak Anda, mohon hubungi konsultan pajak atau kantor pajak setempat.

Peraturan Organization for Economic Co-operation and Development ("OECD") terkait Common Reporting Standard ("CRS") mewajibkan institusi keuangan untuk mengumpulkan, menyimpan dan melaporkan informasi Domisili Wajib Pajak dan informasi keuangan lainnya kepada Otoritas Perpajakan Indonesia.

Pemegang Rekening Keuangan adalah Pemegang Polis

Nomor Rekening Keuangan adalah No. SPAJ/Polis.

I. IDENTIFIKASI PEMEGANG REKENING KEUANGAN

1. Nama Pemegang Rekening Keuangan																	
2. Nomor Rekening Keuangan																	
3. Tempat Lahir								Tanggal Lahir	d	d	m	m	y	y	y	y	
<i>(Untuk Pemegang Rekening Keuangan Individu)</i>														<i>(Untuk Pemegang Rekening Keuangan Individu)</i>			
4. Kewarganegaraan	<input type="checkbox"/> Indonesia		<input type="checkbox"/> Asing, negara asal														
5. Alamat Tinggal Saat ini/Tempat Usaha/Kantor/Sekolah																	
Perumahan/Kompleks/Apartemen/ Nama Tempat Usaha/Kantor/Sekolah																	
Jalan/Blok/Desa/Dusun/Gang																	
Kelurahan/Kecamatan											RT		RW				
Kota/Kabupaten																	
Provinsi											Kode Pos						
Negara																	

II. DEKLARASI DOMISILI WAJIB PAJAK

Apakah Pemegang Rekening Keuangan memiliki kartu identitas Wajib Pajak dari negara lain dan/atau memiliki Domisili Wajib Pajak di luar Indonesia? Ya Tidak

Jika Ya, wajib melengkapi data di bawah ini dengan menuliskan seluruh Negara/Yurisdiksi di mana Pemegang Rekening Keuangan memiliki Domisili Wajib Pajak.

No.	Tax Identification Number (TIN)/ Nomor Identifikasi Wajib Pajak	Negara/Yurisdiksi Domisili Wajib Pajak	Alasan jika TIN tidak tersedia ¹⁾			Jika alasan TIN tidak tersedia adalah B, mohon jelaskan
1.			<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	
2.			<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	
3.			<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	

III. KLASIFIKASI PERUSAHAAN/BADAN *(Pertanyaan tambahan jika Pemegang Rekening Keuangan adalah Perusahaan/Badan)*

<input type="checkbox"/>	a) Institusi Keuangan - selain Badan Investasi.
<input type="checkbox"/>	b) Perusahaan/badan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek dan sebutkan nama bursa efek di mana saham tersebut diperdagangkan: _____
<input type="checkbox"/>	c) Perusahaan/badan yang terafiliasi dengan perusahaan/badan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek dan sebutkan nama perusahaan/badan terafiliasi yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek: _____ Sebutkan nama bursa efek di mana saham tersebut diperdagangkan: _____
<input type="checkbox"/>	d) Badan Pemerintah, Bank Sentral atau Organisasi Internasional.
<input type="checkbox"/>	e) Badan Non-Keuangan Pasif (Perusahaan yang lebih dari 50% sumber pendapatannya hanya berasal dari investasi/merupakan perusahaan investasi). Wajib melengkapi bagian IV. IDENTIFIKASI PIHAK PENGENDALI.
<input type="checkbox"/>	f) Perusahaan/Badan lainnya, jelaskan _____

Catatan: ¹⁾ A: Negara/yurisdiksi tempat Pemegang Rekening Keuangan tinggal tidak menerbitkan Nomor Identifikasi Wajib Pajak (TIN) kepada penduduknya.

B: Pemegang Rekening Keuangan tidak dapat memperoleh TIN atau nomor identifikasi yang setara.

C: TIN tidak diwajibkan (alasan ini hanya dapat dipilih apabila peraturan perundang-undangan domestik di yurisdiksi terkait tidak mengharuskan pengumpulan TIN yang diterbitkan oleh yurisdiksi tersebut).

IV. IDENTIFIKASI PIHAK PENGENDALI *(Pertanyaan tambahan jika Pemegang Rekening Keuangan adalah Perusahaan/Badan Non-Keuangan Pasif)*

A. Pihak Pengendali 1

1. Nama Pihak Pengendali

2. Tipe Pihak Pengendali¹⁾ Pihak Pengendali dari Badan Hukum - pengendalian melalui kepemilikan
 Pihak Pengendali dari Badan Hukum - pengendalian melalui cara lain
 Pihak Pengendali dari Badan Hukum - Pejabat Eksekutif Senior
 Lainnya

3. Tempat Lahir Tanggal Lahir

4. Kewarganegaraan Indonesia Asing, negara asal

5. Alamat Tinggal Saat ini

Perumahan/Kompleks/Apartemen

Jalan/Blok/Desa/Dusun/Gang

Kelurahan/Kecamatan RT RW

Kota/Kabupaten

Provinsi Kode Pos

Negara

6. Deklarasi Domisili Wajib Pajak

Apakah Pihak Pengendali memiliki kartu identitas Wajib Pajak dari negara lain dan/atau memiliki Domisili Wajib Pajak di luar Indonesia? Ya Tidak

Jika Ya, wajib melengkapi data di bawah ini dengan menuliskan seluruh Negara/Yurisdiksi di mana Pihak Pengendali memiliki Domisili Wajib Pajak.

No.	Tax Identification Number (TIN)/ Nomor Identifikasi Wajib Pajak	Negara/Yurisdiksi Domisili Wajib Pajak	Alasan jika TIN tidak tersedia ¹⁾	Jika alasan TIN tidak tersedia adalah B, mohon jelaskan
1.			<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	
2.			<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	
3.			<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	

B. Pihak Pengendali 2

1. Nama Pihak Pengendali

2. Tipe Pihak Pengendali¹⁾ Pihak Pengendali dari Badan Hukum - pengendalian melalui kepemilikan
 Pihak Pengendali dari Badan Hukum - pengendalian melalui cara lain
 Pihak Pengendali dari Badan Hukum - Pejabat Eksekutif Senior
 Lainnya

3. Tempat Lahir Tanggal Lahir

4. Kewarganegaraan Indonesia Asing, negara asal

5. Alamat Tinggal Saat ini

Perumahan/Kompleks/Apartemen

Jalan/Blok/Desa/Dusun/Gang

Kelurahan/Kecamatan RT RW

Kota/Kabupaten

Provinsi Kode Pos

Negara

6. Deklarasi Domisili Wajib Pajak

Apakah Pihak Pengendali memiliki kartu identitas Wajib Pajak dari negara lain dan/atau memiliki Domisili Wajib Pajak di luar Indonesia? Ya Tidak

Jika Ya, wajib melengkapi data di bawah ini dengan menuliskan seluruh Negara/Yurisdiksi di mana Pihak Pengendali memiliki Domisili Wajib Pajak.

No.	Tax Identification Number (TIN)/ Nomor Identifikasi Wajib Pajak	Negara/Yurisdiksi Domisili Wajib Pajak	Alasan jika TIN tidak tersedia ¹⁾	Jika alasan TIN tidak tersedia adalah B, mohon jelaskan
1.			<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	
2.			<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	
3.			<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C	

Catatan: ¹⁾ A: Pengendalian melalui kepemilikan : Orang pribadi yang memiliki lebih dari 25% saham atas suatu badan.
 B: Pengendalian melalui cara lain : Orang pribadi yang menguasai badan melalui voting rights/ agreement.
²⁾ A: Negara/yurisdiksi tempat Pemegang Rekening Keuangan tinggal tidak menerbitkan Nomor Identifikasi Wajib Pajak (TIN) kepada penduduknya.
 B: Pemegang Rekening Keuangan tidak dapat memperoleh TIN atau nomor identifikasi yang setara.
 C: TIN tidak diwajibkan (alasan ini hanya dapat dipilih apabila peraturan perundang-undangan domestik di yurisdiksi terkait tidak mengharuskan pengumpulan TIN yang diterbitkan oleh yurisdiksi tersebut).

